

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis khususnya dibidang pertambangan sumber daya mineral dan batubara. Berdasarkan data, kontribusi pertambangan terhadap perekonomian mencapai 8,03% pada tahun 2018. Namun dalam banyak kasus yang terjadi, pertambangan dapat memicu terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan akibat adanya benturan kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta berkaitan dengan tanah ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika konflik sosial antara masyarakat adat dengan perusahaan terhadap rencana pembangunan tambang emas yang terjadi di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Dalam proses analisis data menggunakan Teori Konflik Sosial Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2004) memaknai konflik sebagai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Penelitian dilakukan di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Desain penelitian yang dipilih adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Triangulasi dipilih untuk melakukan uji keabsahan data.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah akar penyebab terjadinya konflik dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan kepentingan. Adapun faktor perbedaan kepentingan yang melatarbelakangi terjadinya konflik yaitu mengenai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi air, kualitas udara, dan struktur tanah. Kedua, faktor ekonomi dapat mempengaruhi sumber kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Dilihat dari faktor sosial mengenai status kepemilikan tanah ulayat dan dapat menyebabkan konflik sosial baru bagi masyarakat Dua Koto. Dinamika konflik sosialnya dapat dilihat dari tahap pra konflik, kemudian tahap konfrontasi konflik mulai muncul ke permukaan ditandai dengan adanya aksi demonstrasi, pada tahap krisis, konflik mencapai eskalasinya pada tanggal 23 Mei 2018 dan berdampak pada kedua belah pihak. Pasca terjadinya konflik, situasi kembali kondusif dan perusahaan menarik diri dan keluar dari arena konflik tanpa melakukan aktivitas apapun yang berkaitan dengan pertambangan. Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik adalah melalui negosiasi dan konsiliasi.

Kata kunci: Konflik Sosial, Masyarakat Adat, Tanah Ulayat

ABSTRACT

Indonesia is a country that has abundant natural resource potential that can be used economically, especially in the mining of mineral and coal resource. Based on data, contributions of mining to the Indonesian economy reaches 8.03% in 2018. In many cases, mining can lead to conflicts between indigenous community and companies due to conflicts of interest relating to the management and use of natural resource and 'ulayat' land. The purpose of this study is to determine the dynamics of social conflict between indigenous people and companies against development plan of the gold mine that occurred in Kenagarian Simpang Tonang, Dua Koto District, Pasaman Regency, West Sumatra.

In the process of data analysis, researcher using social conflict theory of Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin (2004) interpret conflict as different interest (perceived divergence of interest) or a belief that the aspirations of the conflict parties cannot be achieved simultaneously. The study is conducted at Kenagarian Simpang Tonang, Dua Koto District, Pasaman Regency, West Sumatra. The study design used a qualitative descriptive analysis. Data collection is done by observation, interviews, literature study and documentation. Triangulation of data used to test validity of data.

The result of this study carried out are the root cause due of conflicts based on differences in interests. As for the differences in interest behind the conflict, environmental factors can affect water conditions, air quality, and soil structure. Secondly, economic factors can influence people's sources of life and livelihoods. Seen from, social factors regarding the status of 'ulayat' land and can cause new social conflicts for the indigenous Dua Koto. The dynamics of social conflict can be seen from the pre-conflict level, then the conflict confrontation level began to surface with demonstrations, and on the crisis level, the conflict reached its escalation on May 23, 2018 and affected both parties. After the conflict, situation returned to conducive and the company pull out and left the arena of conflict without carrying out any mining activities. The steps to resolve conflict used negotiation and conciliation process.

Keywords: Social Conflict, Indigenous People, 'Ulayat' land